

## FORM - REGISTER RISIKO & RENCANA TINDAK PENGENDALIAN MITIGASI

**UNIT ORGANISASI** : **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**Tahun** : **2022**

[illegible]

	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	280.375.000		Ketidak Sesuai Bimtek dengan Tusi	Sekretariat		Sekedar mengikuti Bimtek	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	Cross Cek data Oleh Pejabat terkait	Sekretariat	
	<b>5. Kegiatan :</b>							C								
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.477.559.393</b>						C								
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.808.150		perbedaan kebutuhan yang dibutuhkan dengan	Sekretariat		kurangnya koordinasi	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	Cross Cek data Oleh Pejabat terkait	Sekretariat	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	327.509.383		perbedaan kebutuhan yang dibutuhkan dengan yang dibeli	Sekretariat		kurangnya koordinasi	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	Cross Cek data Oleh Pejabat terkait	Sekretariat	
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.456.316.260		perbedaan kebutuhan yang dibutuhkan dengan yang dibeli	Sekretariat		kurangnya koordinasi	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	Cross Cek data Oleh Pejabat terkait	Sekretariat	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.116.800		perbedaan kebutuhan yang dibutuhkan dengan yang dibeli	Sekretariat		kurangnya koordinasi	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	Cross Cek data Oleh Pejabat terkait	Sekretariat	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	229.484.800		Jumlah yang dibeli tidak sesuai dengan tamu	Sekretariat		kurangnya koordinasi	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	Cross Cek data Oleh Pejabat terkait	Sekretariat	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.324.000		lokus yang tidak sama dengan keperluan dinas	Sekretariat		undangan koordinasi yang tidak bisa dipastikan	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	koordinasi dengan pemangku kebijakan	Sekretariat	
	<b>6. Kegiatan :</b>							C								
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.905.914.968</b>						C								
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.675.600.000		Pengadaan Peralatan yang diadakan tidak sesuai dengan spek barang	Sekretariat		ketidaktahuan staf dalam menyusun spek kendaraan	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah		Sekretariat	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.230.314.968		Pengadaan Peralatan yang diadakan tidak sesuai dengan spek barang	Sekretariat		ketidaktahuan staf dalam menyusun spek peralatan	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah		Sekretariat	
	<b>7. Kegiatan :</b>							C								
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.403.387.530</b>						C								
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.911.580		kesalahan dalam pengarsipan surat	Sekretariat		ketidak paham petugas	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah		Sekretariat	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.359.826.050		Tagihan yang tidak pasti setiap bulannya	Sekretariat		pemakaian yang fluktuatif	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	penghematan	Sekretariat	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	976.649.900		kebersihan kantor yg belum maksimal	Sekretariat		kurangnya pengawasan	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	pengawasan	Sekretariat	
	<b>8. Kegiatan :</b>							C								
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.483.684.700</b>						C								

	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.195.929.200		pemeliharaan yang berulang	Sekretariat		kendaraan yang sudah tua	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah			Sekretariat	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	431.857.600		pemeliharaan yang berulang	Sekretariat		peralatan dan mesin yang sudah tua	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	perlunya penggantian peralatan dan mesin		Sekretariat	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	855.897.900			Sekretariat											Sekretariat	
<b>B</b>	<b>Program :</b>																
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>924.199.981.253</b>															
	<b>1. Kegiatan :</b>																
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.624.589.429</b>															
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	300.000.000		Penyusunan Kua dan PPAS yang terlambat	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH		terlambat dibentuk TIM Penyusun Rancangan Peraturan APBD dan APBD-P	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	Permendagri No 9 Tahun 2019 ( SIPD)		BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.324.589.429		Rancangan Peraturan APBD dan APBD-P terlambat disusun	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH		terlambat dibentuk TIM Penyusun Rancangan Peraturan APBD dan APBD-P	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	Permendagri No 9 Tahun 2019 ( SIPD)		BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	
	<b>2. Kegiatan :</b>																
	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>765.918.971</b>															
	- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	475.851.540		Jumlah Rancangan Perda yang diterima tidak seluruhnya diterima	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH		keterlambatan pemda ka/kota dalam menyusun rancangan tentang APBD	C	Memberikan teguran kepada Pemda Kab/kota untuk segera menyusun Rancangan tentang APBD	2	2	4	rendah	Permendagri No 9 Tahun 2019 ( SIPD)		BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	
	- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	161.252.406		Penyampaian Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota sering kali terlambat	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH		Pemerintah Kab/Kota sering terlambat menyampaikan LKPD ke BPK RI	C	Permendagri No 13 Tahun 2006,Permendagri No 11 Tahun 2017	2	2	4	rendah			BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	

	- Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	128.815.025		Penyampaian Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota sering kali terlambat	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Pemerintah Kab/Kota sering terlambat menyampaikan LKPD ke BPK RI	C	Permendagri No 13 Tahun 2006,Permendagri No 11 Tahun 2017	2	2	4	rendah			BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
	<b>3. Kegiatan :</b>						C									
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.272.541.927</b>					C									
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	274.124.787		Pelaksanaan Administarsi Pelayanan kantor terhambat	Kabid Perbendaharaan	Koneksi internet	C	Sesuai SOP	2	2	4	rendah	pengawasan		BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
	- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	307.368.690		Pegawai Tidak tetap waktu nerima gaji	Kabid Perbendaharaan	Ketelambatan Bendahara Pembantu gaji menyampikan mutasi gaji pegawai	C	Sesuai SOP	2	2	4	rendah	pengawasan		BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
	- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	445.867.470		Waktu Penerimaan TPP yg tidak sesuai jadwal	BIDANG PERBENDAHARAAN	Ketelambatan Bendahara Pembantu gaji menyampikan rekap absen ke BKD	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	rendah	pengawasan		BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	245.180.980		Terlambatnya pencairan DAK berikutnya	Kabid Perbendaharaan	Lambatnya Laporan DAK	C	PMK 112	2	2	4	rendah	pengawasan		BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
	<b>4. Kegiatan :</b>															
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>718.906.814</b>														
	- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	115.130.700		Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban yang tidak tidak sesuai jadwal	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Konsolidasi dan rekonsiliasi internal sering tidak dilakukan	C	Permendagri No 13 tahun 2006, Permendagri No 64 tahun 2013 dan PP 71 tahun 2010	2	2	4	rendah	Peningkatan SDM melalui pelatihan petugas penginfut data		BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	236.107.900		penyusunan pertanggung jawaban yang tidak sesuai jadwal	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Konsolidasi dan rekonsiliasi internal sering tidak dilakukan	C	Permendagri No 13 tahun 2006, Permendagri No 64 tahun 2013 dan PP 71 tahun 2010	2	2	4	rendah	Peningkatan SDM melalui pelatihan petugas penginfut data		BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	

	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	103.469.165		Data penerima dana Dekon TP di OPD sering tidak akurat	Kabid Akutansi	petugas di OPD sering kali terlambat melakukan rekon	C		PP No 7 tahun 2008,Permenkeu No 156 tahun 2008	2	2	4	sedang		Peningkatan SDM melalui pelatihan petugas penginfut data	Kabid Akutansi	
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	162.225.500		Kegiatan fiktif	AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Kegiatan tidak dilaksanakan tapi dipertanggungjawabkan	C		<b>Pengawasan oleh atasan langsung</b>	2	2	4	Rendah		Koordinasi dengan OPD terkait	AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	
	- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	101.973.549		Data penerima dana Dekon TP di OPD sering tidak akurat	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	petugas di OPD sering kali terlambat melakukan rekon	C		PP No 7 tahun 2008,Permenkeu No 156 tahun 2008	2	2	4	Rendah		Peningkatan SDM melalui pelatihan petugas penginfut data	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
	<b>5. Kegiatan :</b>																
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>919.499.176.858</b>															
	- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	156.200.000.000			Sekretariat	1) Dinamika RegulasT, Politik dan Kondusivttas Daerah; 2) Kompetensi dan kuantitas SDM yang Hurang memadai; 3) Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang belum tersosialisasi sampai tingkat Kab/Kote.	C		Permendagri NO 77 tahun 2020						Bimtek Petugas dan Pengawasan	Sekretariat	
	- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25.226.371.770			Sekretariat	1) Dinamika RegulasT, Politik dan Kondusivttas Daerah; 2) Kompetensi dan kuantitas SDM yang Hurang memadai; 3) Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang belum tersosialisasi sampai tingkat Kab/Kote.	C		Permendagri NO 77 tahun 2020						Bimtek Petugas dan Pengawasan	Sekretariat	

	- Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	738.072.805.088		Penyaluran belanja transfer tidak sesuai kaidah perundangan	Sekretariat	1) Dinamika Regulasi, Politik dan Kondusifitas Daerah; 2) Kompetensi dan kuantitas SDM yang kurang memadai; 3) Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang belum tersosialisasi sampai tingkat Kab/Kota.	C	Permendagri NO 77 tahun 2020	2	2	4	Rendah	Bimtek Petugas dan Pengawasan	Sekretariat	
	<b>6. Kegiatan :</b>														
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>318.847.254</b>													
	- Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	318.847.254		Pengembangan aplikasi, pemeliharaan serta pengelola IT	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Keterlambatan penyampaian pelayanan/rekon/pelaporan data	C	Permendagri No 13 tahun 2006, Permendagri No 64 tahun 2013 dan PP 71 tahun 2010	2	2	4	Rendah	Peningkatan SDM melalui pelatihan petugas penginput data	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	
<b>C</b>	<b>Program :</b>														
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>3.172.869.464</b>													
	<b>1. Kegiatan :</b>														
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3.172.869.464</b>													
	- Penyusunan Standar Harga	229.634.600		terlambatnya penyusunan standar harga	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	tidak ada pedoman dalam penyusunan RKA	C	Pengawasan langsung	2	2	4	Rendah	bimtek untuk petugas penyusunan standar harga	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	- Inventarisasi Barang Milik Daerah	696.278.371			BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		C							BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	1.036.204.051		tidak diasuransinya aset pemerintah daerah	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	ketidak ada anggaran	C	Pengawasan langsung	2	2	4	Rendah	perlunya penganggaran	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	- Penilaian Barang Milik Daerah	183.262.626		tidak adanya penilaian Aset BMD sehingga terjadinya penumpukan aset yang akan dilelang	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	ketidak tahuan petugas aset BMD	C	Pengawasan langsung	2	2	4	Rendah	bimtek untuk petugas penilai barang	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	756.688.772		terlambatnya pemindahtanganan Aset BMD sehingga terjadi pemupukan aset yang akan dilelang	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	ketidak tahuan petugas aset BMD	C	Pengawasan langsung	2	2	4	Rendah	bimtek untuk petugas penilai barang	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	270.801.044		tidak adanya pembinaan akan menyebabkan laporan BMD tidak valid	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	ketidak tahuan petugas aset BMD	C	Pengawasan langsung	2	2	4	Rendah	bimtek untuk petugas penilai barang	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
<b>D</b>	<b>Program :</b>														
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>15.220.540.835</b>													
	<b>1. Kegiatan :</b>														
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>15.220.540.835</b>													
	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	445.228.670		Tidak Tercapainya PAD	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	Kurangnya kapasitas analisis SDM terhadap potensi PAD	C	Pengawasan Langsung	2	2	4	Rendah	Bintek untuk petugas	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	
	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.652.780.863		Hasil kegiatan tidak maksimal	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	1 Data yang tersedia tidak maksimal, Tidak pernah dilakukan pendataan, Petugas pendataan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya	C	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan waktu yang tepat dan tidak mendadak	2	2	4	Rendah	Koordiansi dengan pemda terkait pajak dan Pelatihan untuk petugas lapangan	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4.873.068.655		Hasil kegiatan tidak maksimal	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	1 Pendataan dan Penyuluhan dan Penagihan Pajak Belum Maksimal	C	Membuat daftar tunggakan pajak	2	2	4	Rendah	Peningkatan SDM untuk pendataan, penyuluhan dan Penagihan Pajak	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3.032.134.495		Pengembangan aplikasi, pemeliharaan serta pengelola IT	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN	Monitoring data transaksi wajib pajak daerah beresiko putus koneksi dan hardware error	C	pengecekan secara rutin berkala terhadap hardware dan jaringan serta penyediaan cadangan hardware	2	2	4	Rendah	Peningkatan SDM IT untuk Pemeliharaan Sistem	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN	

- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	415.022.438		Hasil kegiatan tidak maksimal	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	1	Pendataan dan Penyuluhan dan Penagihan Pajak Belum Maksimal	C		Membuat daftar tunggakan pajak	2	2	4	Rendah	Peningkatan SDM untuk pendataan, penyuluhan dan Penagihan Pajak	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	326.364.064		Kesalahan dalam perhitungan materi pajak	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH		Ketidak sesuaian muatan materi pajak	C		UU No 28 tahun 2009	2	2	4	Rendah	Peningkatan Pelatihan perpajakan untuk SDM	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	475.941.650		Hasil kegiatan tidak maksimal	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH		1, Data yang tersedia tidak maksimal 2, tidak pernah dilakukan pendataan 3, Petugas pendataan tidak maksimal dalam melakukan tugasnya	C		Koordinasi dengan dinas terkait	2	2	4	Rendah	Peningkatan SDM melalui pelatihan	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

**Jambi, 31 Juli 2023**

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

*[Signature]*

(Agus Pirngadi, S.Sos)  
NIP.196912151990031005